

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa tidak ada program yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Kunangan secara spesifik untuk mengatasi masalah pengaguran. Namun masih ada beberapa upaya atau bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah desa kunangan untuk mengatasi masalah pengaguran tersebut berupa pemberdayaan masyarakat namun tidak secara langsung dan beberapa program pelatihan yang belum efektif dikarenakan program tersebut dijalankan hanya dalam kurun waktu satu tahun sekali serta masyarakat yang mengikuti cenderung orang yang selalu sama.
2. Beberapa factor penghambat yang penulis dapat kan tersebut dapat menggambarkan bahwa msh banyak penghambat dalam menyelesaikan permasalahan pengaguran. Strategi untuk mengatasi krisis pengaguran tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja, tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan pengaguran secara lokal. Penyediaan lapangan pekerjaan sangat diperlukan untuk mengatasi pengaguran yang terjadi pada karena masalah pengangguran. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang kosong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan

memindahkan industri (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran struktural.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu Pemerintah perlu serius dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Desa Kunangan khususnya dengan mempersiapkan kebijakan, strategi dan langkah konkrit mengatasi permasalahan pengangguran. Pemerintah seyogyanya berkolaborasi dengan perusahaan, lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu menekan angka pengangguran di Indonesia.

Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penyediaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada masyarakat miskin yang disebabkan oleh pengangguran, sehingga kepentingan masyarakat miskin akan menjadi prioritas dalam pembangunan.